

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis strategi Pemerintah Kota Batam dalam perbaikan permukiman perkotaan ilegal. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, menggali perspektif berbagai pemangku kepentingan, serta menginterpretasikan dinamika sosial dan kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan permukiman ilegal di Kota Batam.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi permukiman ilegal, kebijakan yang diterapkan, serta tantangan dan peluang dalam implementasi strategi perbaikan permukiman. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai efektivitas kebijakan perumahan, infrastruktur publik, kebijakan ekonomi, serta kebijakan sosial dan lingkungan dalam menangani permasalahan permukiman ilegal di Kota Batam.

Penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak kebijakan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian

diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani permukiman ilegal di Kota Batam.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai strategi Pemerintah Kota Batam dalam memperbaiki permukiman perkotaan ilegal. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis fenomena secara sistematis, mulai dari kebijakan yang diterapkan, implementasinya di lapangan, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang telah dijalankan mampu memberikan solusi terhadap persoalan permukiman ilegal di Kota Batam.

Dalam penelitian ini, karakteristik permukiman ilegal di Kota Batam akan dipaparkan secara mendalam, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi pertumbuhannya, seperti pesatnya urbanisasi, keterbatasan lahan permukiman formal, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang bermigrasi ke kota. Selain itu, penelitian ini juga akan menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diterapkan pemerintah, mencakup kebijakan perumahan, infrastruktur publik, kebijakan ekonomi, serta kebijakan sosial dan lingkungan yang berperan dalam proses perbaikan permukiman ilegal.

Lebih lanjut, penelitian ini akan menelaah implementasi strategi yang dilakukan oleh pemerintah, dengan mengkaji efektivitas program-program yang telah berjalan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor seperti regulasi, keterbatasan anggaran, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kebijakan permukiman ilegal di Kota Batam. Selain itu, perspektif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengembang, akademisi, organisasi masyarakat, dan warga permukiman ilegal, juga akan dikaji guna memahami peran serta kontribusi mereka dalam upaya perbaikan tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menangani permukiman ilegal secara berkelanjutan. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga menawarkan wawasan yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kebijakan dan realitas sosial di lapangan. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perumusan strategi yang lebih terarah dalam mengatasi permasalahan permukiman ilegal di Kota Batam.

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan,

pengelolaan, serta pelaksanaan kebijakan terkait perumahan dan permukiman. Dinas ini berperan dalam penyediaan hunian yang layak, penataan kawasan permukiman, serta pengembangan infrastruktur permukiman yang sesuai dengan standar tata kota. Selain itu, dinas ini juga bertugas dalam merancang serta menerapkan berbagai program perbaikan permukiman ilegal, baik melalui relokasi, peningkatan infrastruktur dasar, maupun pemberdayaan masyarakat yang berdampak.

Dalam penelitian ini, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam akan menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi terkait kebijakan serta strategi yang diterapkan dalam menangani permukiman ilegal. Data yang akan dikumpulkan mencakup program-program yang telah dijalankan, kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan, serta evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat di permukiman ilegal, akademisi, serta organisasi yang bergerak di bidang perumahan dan lingkungan, guna memperoleh sudut pandang yang lebih luas.

Dengan menempatkan Kota Batam sebagai lokasi penelitian dan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan sebagai objek utama, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam mengenai upaya pemerintah dalam memperbaiki kondisi permukiman ilegal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan permukiman di Kota Batam.

3.3. 2. Periode Penelitian

Tabel 3. 1. Periode Penelitian

No	Kegiatan																																
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari											
1	Studi Pustaka	■	■	■	■					■	■	■	■																				
2	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																												
3	Observasi Lapangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
4	Analisis Data Sekunder									■	■	■	■	■	■	■	■																
5	Pengumpulan Data Primer													■	■	■	■	■	■	■	■												
6	Analisis Data																	■	■	■	■	■	■	■	■								
7	Penyusunan Laporan Akhir																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Diseminasi Hasil Penelitian																																

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait, seperti pejabat di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat yang tinggal di permukiman ilegal. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai strategi pemerintah dalam menangani permukiman ilegal, program yang telah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perumahan dan permukiman di Kota Batam. Selain itu, observasi langsung di lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi fisik dan sosial permukiman ilegal, serta melihat dampak kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan kebijakan, peraturan daerah, serta publikasi yang relevan dari instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan penelitian akademik sebelumnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk memahami konteks kebijakan perumahan di Kota Batam, tren perkembangan permukiman ilegal, serta kajian terdahulu yang membahas permasalahan serupa di berbagai wilayah. Data sekunder juga mencakup laporan tahunan dari Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam yang berisi evaluasi program serta capaian dalam upaya penataan permukiman.

Kombinasi antara data primer dan sekunder dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi pemerintah dalam menangani permukiman ilegal di Kota Batam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada kebijakan yang telah dirumuskan, tetapi juga pada implementasi kebijakan tersebut di lapangan, tantangan yang muncul, serta dampaknya terhadap masyarakat.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai strategi Pemerintah Kota Batam dalam perbaikan permukiman perkotaan ilegal. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam, serta tokoh

masyarakat dan warga yang tinggal di permukiman ilegal. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung mengenai kebijakan dan program yang telah dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

Selain wawancara, penelitian ini juga menerapkan observasi langsung untuk mengamati kondisi fisik dan sosial permukiman ilegal di Kota Batam. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami kondisi infrastruktur, akses terhadap fasilitas publik, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih akurat dan menggambarkan realitas di lapangan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi pemerintah, peraturan daerah, laporan tahunan, serta kajian akademik yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memahami kebijakan perumahan dan permukiman yang telah diterapkan, perkembangan permukiman ilegal di Kota Batam, serta evaluasi terhadap efektivitas program yang telah berjalan.

Dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini berupaya untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai strategi pemerintah dalam menangani permukiman ilegal di Kota Batam.

3.6 Metode Analisis Data

Pengertian analisis data adalah proses menafsirkan dan mengumpulkan data

yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian, yang kemudian diolah dan dikelola untuk mengidentifikasi informasi dan fakta yang relevan. Penelitian ini mengaplikasikan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan menganalisis sumber data primer dan sekunder. Metode ini digunakan untuk memungkinkan deskripsi dan interpretasi data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

Tujuan studi deskriptif adalah untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran atau memverifikasi suatu konsep, sehingga dapat memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan yang relevan sesuai dengan obyek penelitian. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengamati gejala, fakta, dan kejadian secara sistematis terkait populasi atau karakteristik suatu daerah.

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data dan evaluasi data-data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi. Setelah data yang dikumpulkan melalui proses penelitian terkumpul, data tersebut kemudian dideskripsikan menjadi gambaran terkait permasalahan hukum yang dikaji. Dalam konteks ini, perdebatan berkaitan dengan tingkat efektivitas dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. Selama 8 tahun sejak tahun 2016, kami telah berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik di bidang transportasi.